

Terobosan Perizinan dan Pembiayaan Usaha Sapi: Peluang Emas Peternakan Indonesia

Breakthroughs in Cattle Business Licensing and Financing: A Golden Opportunity for Indonesian Livestock



Gravita Puji Lestari, S.Pt

Penelaah Teknis Kebijakan

Kemudahan izin dan akses modal kini menjadi kunci kebangkitan peternakan sapi nasional. Hal ini mengemuka dalam Talk Show “Peluang Emas Dunia Peternakan: Kiat Sukses Perizinan

Perizinan Berusaha dan Pembiayaan dalam Mendukung Investasi Usaha Sapi” yang digelar Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di ajang ILDEX Indonesia 2025, Kamis (18/9) di ICE BSD City, Tangerang. Kegiatan ini sekaligus memeriahkan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan serta mendukung Program Percepatan Produksi Susu dan Daging Dalam Negeri (P2SDN).

Ease of permits and access to capital are now key to the revival of national cattle farming. This was highlighted in the talk show "Golden Opportunities in the Livestock World: Tips for Successful Business Licensing and Financing to Support Cattle Business Investment" held by the Directorate General of Livestock and Animal Health at ILDEX Indonesia 2025 on Thursday (September 18th) at ICE BSD City, Tangerang. This event also celebrated Livestock and Animal Health Service Month and supported the Domestic Milk and Meat Production Acceleration Program (P2SDN).





Dalam sesi awal, pakar lingkungan dari Kementerian LHK menekankan bahwa perizinan berusaha kini jauh lebih ringkas. Pelaku usaha cukup menyiapkan dokumen lingkungan—UKL-UPL atau Amdal sesuai skala dan mengajukannya melalui sistem OSS terintegrasi Amdalnet. “Dengan kelengkapan data, persetujuan bisa selesai maksimal 20 hari kerja,” paparnya.

Selain itu, proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang kerap menjadi hambatan kini diatur dengan mekanisme fiktif positif sehingga bila batas waktu terlewati, izin dianggap sah. Pendaftaran melalui OSS dan ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi kunci percepatan.

Bank BJB memperkenalkan Kredit Usaha Alsintan, fasilitas pembiayaan hingga lima miliar rupiah dengan bunga kompetitif sekitar 6–7% per tahun. Skema ini dirancang membantu peternak dan koperasi memperoleh peralatan modern seperti sistem pemerahan otomatis, chopper hijauan pakan, instalasi biogas, hingga kendaraan pendingin untuk distribusi susu dan daging. Masa tenggang pembayaran hingga satu tahun memberi keleluasaan bagi pelaku usaha menyesuaikan siklus produksi.

Isu keberlanjutan juga menjadi sorotan. Narasumber menekankan pentingnya dokumen lingkungan untuk mengantisipasi pencemaran air, udara, dan tanah akibat limbah peternakan. Konsep zero liquid discharge (ZLD) diperkenalkan sebagai solusi pengelolaan limbah cair agar tidak ada buangan ke lingkungan. Meski investasi awal cukup tinggi, penerapan teknologi biogas dan perencanaan kandang sejak awal dapat menekan biaya. Perusahaan pun disarankan menyiapkan tenaga internal HSE (Health, Safety, and Environment) agar tidak tergantung konsultan ketika muncul masalah perizinan.

In the opening session, an environmental expert from the Ministry of Environment and Forestry emphasized that business licensing is now much more streamlined. Businesses simply need to prepare environmental documents—UKL-UPL or Amdal—according to scale and submit them through the integrated OSS system Amdalnet. “With complete data, approval can be completed in a maximum of 20 working days,” he explained. Furthermore, the Spatial Utilization Activity Conformity (KKPR) process, a frequent obstacle, is now regulated by a positive fictitious mechanism, so that if the deadline is exceeded, the permit is considered valid. Registration through the OSS (Online Shopping Center) and the availability of a Detailed Spatial Planning Plan (RDTR) are key to accelerating the process.

Bank BJB introduced the Agricultural Machinery Business Credit (Kredit Usaha Alsintan), a financing facility of up to five billion rupiah with a competitive interest rate of around 6–7% per year. This scheme is designed to help livestock farmers and cooperatives acquire modern equipment such as automatic milking systems, forage choppers, biogas installations, and refrigerated vehicles for milk and meat distribution. A grace period of up to one year allows businesses to adjust their production cycles.

Sustainability issues were also highlighted. Speakers emphasized the importance of environmental documentation to prevent water, air, and soil pollution from livestock waste. The concept of zero liquid discharge (ZLD) was introduced as a solution for liquid waste management to eliminate discharge into the environment. Although the initial investment is quite high, implementing biogas technology and planning livestock housing from the outset can reduce costs. Companies are also advised to prepare internal HSE (Health, Safety, and Environment) personnel to avoid relying on consultants when licensing issues arise.

Diskusi juga membahas kendala lapangan seperti kasus keterlambatan izin di salah satu perusahaan di Blitar. Solusinya: gunakan RDTR terintegrasi OSS, lengkapi dokumen sejak awal, dan ajukan Pertimbangan Teknis Pertanahan lebih dini.

Direktorat Jenderal PKH menegaskan komitmen memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, KLHK, dan perbankan agar percepatan izin dan akses kredit benar-benar terwujud. Dari penyederhanaan OSS hingga kredit Alsintan, seluruh langkah ini dirancang membuka pintu investasi sapi yang lebih cepat, ramah lingkungan, dan menguntungkan. "Percepatan perizinan dan kemudahan pembiayaan adalah fondasi peningkatan produksi susu dan daging dalam negeri," tegas Direktur Pakan dalam sambutan pembuka. "Percepatan perizinan dan kemudahan pembiayaan adalah fondasi peningkatan produksi susu dan daging dalam negeri," tegas Direktur Pakan dalam sambutan pembuka. Dengan dukungan lintas kementerian dan dunia perbankan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menanam investasi di sektor peternakan sapi. Prosedur yang dulunya rumit kini telah dipangkas, sementara fasilitas kredit memberi ruang bagi peternak dan investor pemula sekalipun.(gpl)

The discussion also addressed field obstacles, such as the case of delayed permits at a company in Blitar. The solution: use the RDTR integrated with the OSS (Online Shopping Center), complete the documents from the start, and submit the Land Technical Consideration (Perlisan Teknis Tanah) early.

The Directorate General of PKH affirmed its commitment to facilitating coordination with the Ministry of ATR/BPN, the Ministry of Environment and Forestry, and the banking sector to ensure accelerated permitting and credit access. From OSS simplification to agricultural machinery credit, all these steps are designed to open the door to faster, more environmentally friendly, and profitable cattle investment. "Accelerated licensing and easier financing are the foundation for increasing domestic milk and meat production," emphasized the Director of Feed in his opening remarks. "Accelerated licensing and easier financing are the foundation for increasing domestic milk and meat production," emphasized the Director of Feed in his opening remarks. With support from across ministries and the banking sector, now is the right time to invest in the cattle farming sector. Once-complicated procedures have been streamlined, while credit facilities have opened the door for even novice breeders and investors.(gpl)

